

**THE INFLUENCE OF VILLAGE APPARATUS COMPETENCE, INTERNAL CONTROL SYSTEM AND WHISTLEBLOWING SYSTEM ON FRAUD PREVENTION IN VILLAGE GOVERNMENT WITH INDIVIDUAL MORALITY AS MODERATED VARIABLES
(STUDY IN VILLAGES IN BENGKALIS DISTRICT)**

Romadaniati¹, Taufeni Taufik², Azwir Nasir³

^{1,2&3}Universitas Riau

Email : nia.romadaniati@gmail.com^{1*}

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine and analyze the influence of village apparatus competence, internal control systems and whistleblowing systems on fraud prevention in village governance with individual morality as a moderating variable. The population of this study is the population in this study villages in Bengkalis Regency are 136 villages. The sampling technique in this study was purposive sampling so that 102 villages were obtained. Respondents in this study were the Village Head, Village Secretary and Finance Kaur, totaling 306 people. Data analysis to test hypotheses using multiple regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that: Apparatus competence influences fraud prevention, internal control system influences fraud prevention, Whistleblowing system influences fraud prevention, individual morality moderates the influence of village apparatus competence on fraud prevention, individual morality moderates the influence of internal control system on fraud prevention, and Individual morality moderates the influence of the whistleblowing system on fraud prevention.

Keywords: *Fraud Prevention; Village Apparatus Competency; Internal Control System; Whistleblowing Systems; Individual Morality*

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAHAN DESA DENGAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERASI. (STUDI PADA DESA-DESA DI KABUPATEN BENGKALIS)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini desa yang berada di Kabupaten Bengkalis berjumlah 136 Desa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling sehingga diperoleh sampel 102 desa. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang berjumlah 306 orang. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, moralitas individu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*, moralitas individu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, dan moralitas individu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

Kata Kunci: *Pencegahan Fraud; Kompetensi Aparatur Desa; Sistem Pengendalian Internal; Whistleblowing System; Moralitas Individu*

PENDAHULUAN

Pencegahan *fraud* bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut. Dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini. (Fitrawansyah, 2014)

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terhadap pengelolaan Keuangan Desa (ADD dan DD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dan 2018. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan bahwa terdapat 32 Desa yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2017 sebesar Rp94.175.650.847,64, dan 102 Desa pada tahun 2018 sebesar Rp85.959.593.400,00. Oleh karena itu, realisasi penyaluran dana desa belum sepenuhnya tepat waktu oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Desa. BPK melakukan pemeriksaan atas rekening koran RKUD yang menunjukkan keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKUDes.

Menurut BPK RI, kondisi ini mengakibatkan penggunaan APBDes tidak dapat dipantau dan berpotensi tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh sebab itu, menurut Atmadja & Saputra (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur (SDM) dikatakan memadai apabila dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran pada tingkat keuangan desa, sehingga segala pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan (*fraud*).

Begitu pula menurut Kurniawan (2014), tanpa adanya penerapan pengendalian intern yang baik akan menjadikan para koruptor lebih leluasa dalam melakukan korupsi. Penerapan unsur-unsur pengendalian intern dengan maksimal akan dapat membantu dalam menekan tingkat korupsi.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), *Whistleblowing System* yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak untuk mencegah terjadinya *fraud* dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya.

Faktor lain yang dapat memoderasi pencegahan *fraud* menurut penelitian Wonar et al. (2018) yaitu moral yang dimiliki oleh setiap individu. Moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pola pikir ini akan berdampak pada berkurangnya keinginan untuk melakukan kecurangan dari dalam diri seseorang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pencegahan *Fraud*

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum. (Suradi, 2006) Terdapat dua faktor dalam mencegah terjadinya kecurangan yaitu menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan asistensi, serta menghilangkan kesempatan untuk berbuat curang.

Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. (Permendagri, 2017). Hutapea, Thoha (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu: pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa : “Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. (PP, 2008)

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Bengkalis) (Romadaniati, Taufeni Taufik, Azwir Nasir)

Whistleblowing System

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008), *Whistleblowing* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. Terdapat aspek-aspek dalam *Whistleblowing System* ini terdiri dari aspek struktural, aspek operasional dan aspek perawatan (*maintenance*).

Moralitas Individu

Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. (Welton, R. E.; LaGrone, 1994). Teori perkembangan moral pertama kali dikemukakan oleh Kohlberg (1969) dan telah banyak digunakan dalam memahami alasan yang dibuat seseorang saat membuat pertimbangan moral. Hal penting lain dari teori perkembangan moral Kohlberg adalah orientasinya untuk mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan yang nyata. Semakin tinggi tahap perkembangan moral seseorang, semakin terlihat moralitas yang lebih mantap dan bertanggung jawab dari perbuatan-perbuatannya. Selanjutnya Kohlberg mengkategorikan dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam tiga tingkatan yaitu Prakonvensional Moralitas, Konvensional dan Pasca-Konvensional. (Desmita, 2017)

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut Purba (2015) dalam merekrut pegawai pada suatu organisasi, penting untuk mengetahui karyawan-karyawan untuk mengevaluasi tingkat kepercayaan dan kompetensi mereka sebagai salah satu mekanisme penguatan budaya anti-*fraud* dalam program pencegahan *fraud*.

Menurut penelitian Wahyuni & Nova (2019), Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dengan memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur akan mampu mencegah terjadinya *fraud*, karena aparatur tersebut telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku.

H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut YR (2017), Manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang akan membantu pencegahan terjadinya *fraud*.

Menurut penelitian Atmadja & Saputra (2017), Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan bahwa segala jenis tindakan kecurangan dalam keuangan di suatu organisasi atau pemerintahan dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang memadai.

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut Purba (2015), salah satu prinsip pencegahan *fraud* yakni perlunya penetapan sebuah mekanisme yang membuat *fraud* dapat dilaporkan (*whistleblowing system*) dan adanya perlindungan terhadap pelapor *fraud*. Suatu pengaduan karyawan yang telah beroperasi dapat membantu mencegah *fraud* karena individu-individu mungkin takut bahwa suatu *fraud* akan diketahui karyawan lain dan akan diadukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Nova (2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab serta dilakukannya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* mampu mencegah terjadinya kecurangan.

H3 : *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi.

Kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan sering disalahgunakan untuk melakukan kecurangan tanpa didampingi dengan moralitas yang baik, namun moralitas yang baik dan kompetensi aparatur yang memadai juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal sehingga mampu mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. (Atmadja dan Saputra, 2017)

Menurut penelitian Atmadja & Saputra (2017), Moralitas berhasil memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Hal ini diakibatkan karena kompetensi

atau kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan sering disalahgunakan untuk melakukan kecurangan didampingi dengan moralitas yang baik.

H4 : Moralitas individu sebagai pemoderasi kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi

Dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang baik sehingga segala tindak kecurangan dapat dicegah. Sistem pengendalian internal akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sikap dan budaya personal yang baik atau yang sering disebut dengan moralitas (Purwitasari, 2017). Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan: membina, memelihara, dan menjaga mental/moral pegawai agar senantiasa bersikap jujur, disiplin, setia, beretika, dan berdedikasi; membangun mekanisme sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif (STAN, 2007 dalam Taufik, 2011). Karena menurut Usman, Bhima Azis (2015), sebaik apapun suatu sistem pengendalian internal yang berada disuatu pemerintahan, apabila pejabat menyalahgunakan wewenangnya (tidak memiliki moral yang baik) maka suatu *fraud* akan terjadi.

Menurut penelitian Atmadja & Saputra (2017), Moralitas berhasil memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa. Hal ini diakibatkan karena moralitas yang baik dan kompetensi aparatur yang memadai juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal sehingga mampu mencegah fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

H5 : Moralitas individu sebagai pemoderasi sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

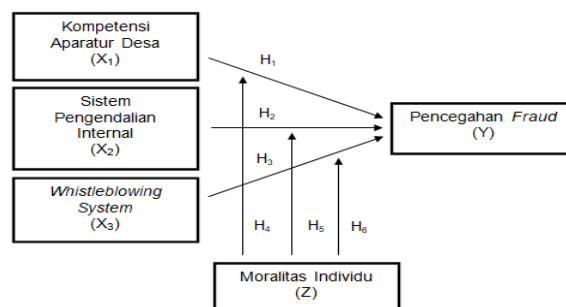
Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi.

Menurut Kurniawan (2018), *Whistleblowing system* akan menghasilkan keputusan seseorang untuk menjadi *whistleblower* yang dipengaruhi oleh budaya dan seberapa baik nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dalam organisasi pemerintahan. Seorang *whistleblower* harus melihat bahwa aktivitas *whistleblowing* adalah diperlukan untuk mencegah perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat.

Menurut penelitian Manafe (2015) menyatakan bahwa level penalaran moral berpengaruh terhadap kecenderungan individu melakukan *whistleblowing*. Individu dengan level penalaran moral lebih tinggi lebih cenderung melakukan *whistleblowing* dibandingkan dengan individu dengan level penalaran moral rendah.

H6 : Moralitas individu sebagai pemoderasi *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Model Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependen) yaitu kecenderungan *fraud* dan variabel bebas (independen) yaitu Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System*, serta variabel moderasi moralitas individu. Jumlah sampel yang diambil dari seluruh jumlah populasi yaitu adalah sebanyak 102 desa. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang berjumlah 306 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dikumpulkan melalui metode angket, yaitu dengan melakukan penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan didalam kuesioner penelitian. Penyebaran kuesioner langsung dilakukan oleh penulis dan dalam penjemputan kuesioner juga langsung dijemput kembali oleh penulis ke masing-masing kantor desa yang ada pada 10 (sepuluh) kecamatan dengan jumlah 102 desa dan seluruh responden sebanyak 306 responden.

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini telah menyebarkan 306 kuesioner kepada para aparatur Desa di Kabupaten Bengkalis dengan pengembalian kuesioner 85,29 % atau sebanyak 261 kuesioner yang dapat diolah.

Demografi Responden

Dari seluruh jumlah responden dalam penelitian ini didominasi dengan jenis kelamin pria. Adapun mayoritas memiliki lama bekerja 1 – 5 tahun, Mayoritas yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah Kaur Keuangan. Responden mayoritas memiliki lama menjabat 1 – 3 tahun dan tingkat pendidikan yang dimiliki responden didominasi tamatan strata 1 (S1),

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pencegahan <i>fraud</i>	261	3,62	5,00	4,44	0,43041
Kompetensi Aparatur	261	3,73	5,00	4,38	0,38399
SPI	261	3,69	4,94	4,37	0,32224
<i>Whistleblowing System</i>	261	3,20	5,00	4,14	0,39850
Moralitas Individu	261	3,50	5,00	4,23	0,31484
Valid N (listwise)	261				

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan di atas menjelaskan bahwa rata-rata hasil tanggapan responden untuk variabel pencegahan *fraud* dengan nilai rata-rata sebesar 4,44 dan tergolong sangat baik. Variabel kompetensi aparatur dengan nilai rata-rata sebesar 4,38 tergolong sangat baik, variabel sistem pengendalian internal dengan nilai rata-rata sebesar 4,37 tergolong sangat baik, kemudian variabel *whistleblowing system* dengan nilai rata-rata sebesar 4,41 tergolong baik, dan moralitas individu dengan nilai rata-rata sebesar 4,23 tergolong sangat baik.

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil penelitian validitas secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel pencegahan *fraud*, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas individu di atas kriteria 0,1381 (r tabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian reliabilitas secara statistik koefisien reliabilitas instrumen pencegahan *fraud*, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, moralitas individu, bahwa koefisien Cronbach Alpha >0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan kurva *P-P plot* dan *Kolmogorov-Smirnov* Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian hipotesis.

Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,882 terletak antara $Du (1,819) < 1,882 < 4 - Du (2,118)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa VIF untuk seluruh variabel bebas <10 dan begitu juga nilai tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil perhitungan dari grafik *scatterplot* dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Hasil Uji Regresi

Hasil Pengujian Model Regresi Linier Berganda

Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dinyatakan dalam model persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Tabel 2. Hasil Uji Model Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	9.538	4.116		2.317
	Kompetensi Aparatur (X2)	.283	.060	.292	4.679
	SPI (X2)	.262	.067	.241	3.881
	Whistleblowing System (X3)	.183	.056	.195	3.243

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

Sumber: Data Olahan

Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regres Analysis*)

Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Model 1

Model analisis regresi dengan moderasi dalam penelitian ini dinyatakan dalam model persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \beta_3 X_1 Z + e$$

Tabel 3. Hasil Uji Moderated Regression Analysis Model 1

		Coefficients ^a		T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	34.931	7.756		4.504
	Kompetensi Aparatur (X1)	.128	.108	.133	1.189
	Moralitas Individu (Z)	-.098	.110	-.084	-.888
	X1Z	.005	.001	.513	3.406

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa nilai sig. moralitas individu (Z) > 0,05, dan sig. Interaksi (X1Z) < 0,05, sehingga tergolong jenis *pure moderator*.

Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Model 2

Model analisis regresi dengan moderasi dalam penelitian ini dinyatakan dalam model persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z + \beta_3 X_2 Z + e$$

Tabel 4. Hasil Uji Moderated Regression Analysis Model 2

Model		Coefficients ^a		T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error		
1	(Constant)	27.879	8.517	3.273	.001
	SPI (X2)	.185	.111	.170	.097
	Moralitas Individu (Z)	-.063	.119	-.054	.597
	X2Z	.004	.001	.458	.002

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat bahwa nilai sig. moralitas individu (Z) > 0,05, dan sig. Interaksi (X₂Z) < 0,05, sehingga tergolong jenis *pure moderator*.

Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Model 3

Model analisis regresi dengan moderasi dalam penelitian ini dinyatakan dalam model persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_3 + \beta_2 Z + \beta_3 X_3 Z + e$$

Tabel 5. Hasil Uji Moderated Regression Analysis Model 3

Model		Coefficients ^a		T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error		
1	(Constant)	46.973	10.957	4.287	.000
	Whistleblowing System (X3)	-.103	.166	-.110	.536
	Moralitas Individu (Z)	-.197	.162	-.169	.224
	X3Z	.007	.002	.733	.003

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 5. dapat dilihat bahwa nilai sig. moralitas individu (Z) > 0,05, dan sig. Interaksi (X₃Z) < 0,05, sehingga tergolong jenis *pure moderator*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600 ^a	.360	.352	4.479

a. Predictors: (Constant), Whistleblowing System (X3), SPI (X2), Kompetensi Aparatur (X1)

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 6. di atas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,352 atau 35,2 %. Artinya, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* dapat mempengaruhi Pencegahan *Fraud* sebesar 35,2 %. Sedangkan sisanya 64,8 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien Regresi	t Hitung	Signifikan	Hasil Hipotesis
Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (H1)	0,283	4,679	0.000	Hipotesis diterima
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (H2)	0,262	3,881	0,000	Hipotesis diterima
Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (H3)	0,183	3,243	0,001	Hipotesis diterima
Moralitas Individu Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (H4)	0,005	3,406	0,001	Hipotesis diterima
Moralitas Individu Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (H5)	0,004	3,146	0,002	Hipotesis diterima
Moralitas Individu Memoderasi Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (H6)	0,007	3,039	0,003	Hipotesis diterima

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa sudah sangat baik sehingga dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Hubungan antara kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pemerintah desa adalah semakin tinggi kompetensi aparatur yang dimiliki maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan *fraud* pada pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis.

Dengan adanya kompetensi aparatur yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Atmadja & Saputra (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur (SDM) dikatakan memadai apabila dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran pada tingkat keuangan desa, sehingga segala pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini sejalan dengan Wahyuni & Nova (2019), Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dengan memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur akan mampu mencegah terjadinya *fraud*, karena aparatur tersebut telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku. Berbeda dengan Penelitian Huda, Nurul; Sadeli (2018) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi seseorang yang mempunyai kemampuan/kompeten dalam bidang tertentu tetapi memiliki keinginan berbuat kecurangan tetap ada dalam suatu organisasi.

Hasil Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berpengaruhnya sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, hal ini diduga bahwa tujuan pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis telah berjalan sesuai perencanaan dengan pengendalian dan pengawasan, sehingga dengan adanya pengendalian dan pengawasan kecurangan dapat dicegah.

Menurut Mulyadi (2016) bahwasanya sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Bengkalis) (Romadaniati, Taufeni Taufik, Azwir Nasir)

data akuntansi. Dengan adanya pengendalian yang efektif, maka dapat dipastikan bahwa tingkat terjadinya kecurangan akuntansi dapat dikurangi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pencegahan *fraud* akan meningkat seiring dengan semakin efektifnya sistem pengendalian internal. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Atmadja & Saputra (2017), yang menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan bahwa segala jenis tindakan kecurangan dalam keuangan di suatu organisasi atau pemerintahan dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang memadai. Penelitian Taufik (2019) juga menyimpulkan bahwa Implementasi sistem pengendalian internal mempengaruhi pencegahan *fraud*. Berbeda dengan penelitian Wonar et al. (2018) yang menyatakan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pemerintahan desa merupakan daerah otonom sehingga belum memahami pentingnya menerapkan dan memelihara pengendalian internal yang efektif yang merupakan tanggung jawab semua pihak.

Hasil Hipotesis Ketiga (H3)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan *whistleblowing system* di Kabupaten Bengkalis sudah efektif sehingga dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Di Kabupaten Bengkalis penerapan *whistleblowing system* merupakan upaya yang bertujuan untuk melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Pemerintahan Desa.

Menurut Purba (2015), salah satu prinsip pencegahan *fraud* yakni perlunya penetapan sebuah mekanisme yang membuat *fraud* dapat dilaporkan (*whistleblowing system*) dan adanya perlindungan terhadap pelapor *fraud*. Suatu pengaduan karyawan yang telah beroperasi dapat membantu mencegah *fraud* karena individu-individu mungkin takut bahwa suatu *fraud* akan diketahui karyawan lain dan akan diadukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agusyani et al. (2016) menemukan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang signifikan pada pencegahan kecurangan dalam organisasi. Sejalan dengan penelitian Wahyuni & Nova (2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggungjawab serta dilakukannya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* mampu mencegah terjadinya kecurangan. Berbeda dengan penelitian Dewi (2016), tidak terdapat pengaruh antara *whistleblowing system* terhadap kecurangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya keengganan seseorang melakukan *whistleblowing*, adanya keraguan terhadap perlindungan *whistleblower* dan belum efektifnya *whistleblowing system* pada sebuah organisasi.

Hasil Hipotesis Keempat (H4)

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah Moralitas individu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hipotesis diperoleh bahwa Moralitas individu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* di pemerintahan desa di Kabupaten Bengkalis. Artinya semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka individu tersebut semakin mungkin untuk meningkatkan moralitas individunya maka dan melakukan hal yang benar dan cenderung dapat mencegah *fraud* atau dapat dikatakan semakin tinggi moralitas individu maka semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan perbuatan tidak etis (*fraud*).

Menurut Kurniawan (2014), Faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang berkualitas merupakan faktor paling penting. Salah satu unsur yang menunjukkan seberapa baik kualitas aparat dalam menjalankan tugasnya adalah seberapa baik aparatur dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai integritas di dalam diri mereka masing-masing. Penerapan nilai-nilai integritas tersebut dapat mencegah terjadinya korupsi karena menurut Kurniawan (2014), integritas dalam diri seseorang adalah kesesuaian antara ucapan yang dikatakan seseorang dengan tindakan yang dilakukannya. Ucapan-ucapan yang dikatakannya harus sesuai dengan etika dan nilai-nilai moral.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Atmadja & Saputra (2017) yang menyimpulkan bahwa moralitas berhasil memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Hal ini diakibatkan karena kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan sering disalahgunakan untuk melakukan kecurangan didampingi dengan moralitas yang baik. Berbeda dengan penelitian Wonar et al. (2018) yang menyatakan bahwa Sensitivitas Moral tidak memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa sensitivitas moral tidak memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil Hipotesis Kelima (H5)

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah moralitas individu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh bahwa moralitas individu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa. Hal ini disebabkan moralitas yang dimiliki oleh aparatur desa sudah tergolong sangat baik sehingga dapat meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pada pemerintahan desa dengan baik juga dan akhirnya dapat mencegah *fraud*.

Menurut Kurniawan (2014), Implementasi lingkungan pengendalian yang baik dalam sistem pengendalian intern dapat mencegah korupsi. Pembentukan lingkungan pengendalian yang kondusif sangat penting dalam pencegahan korupsi karena elemen utama dalam lingkungan pengendalian adalah integritas, kejujuran dan pengembangan kode etika dan nilai-nilai etika. Karena seseorang yang memiliki integritas akan menjalani hidup dengan memegang teguh dan menjalankan prinsip, kode etik dan nilai-nilai moral yang dimilikinya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Atmadja & Saputra (2017) yang menyimpulkan bahwa moralitas berhasil memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Hal ini diakibatkan karena moralitas yang baik dan kompetensi aparatur yang memadai juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal sehingga mampu mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan penelitian Wonar et al. (2018) yang menyatakan bahwa Sensitivitas Moral tidak memoderasi sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa sensitivitas moral tidak memperkuat hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil Hipotesis Keenam (H6)

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah moralitas individu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh bahwa moralitas individu memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa moralitas individu mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa di Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan masing-masing aparatur desa mendorong perbaikan kondisi yang lebih baik, khususnya melalui peran sebagai *whistleblower*. Tanpa adanya dorongan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial dan masyarakat, dampak yang ditimbulkan tentu sangat besar. Misalnya, timbulnya perilaku yang menyimpang, termasuk praktik-praktik yang koruptif.

Menurut Kurniawan (2018), *Whistleblowing system* akan menghasilkan keputusan seseorang untuk menjadi *whistleblower* yang dipengaruhi oleh budaya dan seberapa baik nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dalam organisasi pemerintahan. Niat seseorang untuk menjadi *whistleblower* erat hubungannya dengan komitmen seseorang terhadap integritas dan nilai-nilai moral dan kebenaran. Seorang *whistleblower* harus melihat bahwa aktivitas *whistleblowing* adalah diperlukan untuk mencegah perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Manafe (2015), yang menyatakan bahwa level penalaran moral berpengaruh terhadap kecenderungan individu melakukan *whistleblowing*. Individu dengan level penalaran moral lebih tinggi lebih cenderung melakukan *whistleblowing* dibandingkan dengan individu dengan level penalaran moral rendah. Berbeda dengan penelitian Bernardin & Solihat (2019) Moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

PENUTUP

Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, Moralitas individu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*, Moralitas individu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, dan Moralitas individu memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode gabungan antara kuesioner dan wawancara dengan lebih memperluas ruang lingkup penelitian.

Bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* untuk dapat memperkuat gambaran dan hasil dari variabel yang diteliti.

Bagi instansi pemerintah, dalam menyelenggarakan program pencegahan *fraud* harus mengoptimalkan Kompetensi Aparatur Desa, melakukan pengawasan baik melalui Sistem Pengendalian Internal dan mengoptimalkan *Whistleblowing System* agar mampu dengan cepat mencegah setiap perbuatan curang yang akan dilakukan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

Bagi instansi pemerintah, agar kedepannya lebih memperhatikan moralitas individu terutama pada kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system*. Karena moralitas individu akan meningkatkan pencegahan *fraud*. Dan bagi pemerintah desa agar meningkatkan perilaku pegawai untuk dapat berkomitmen pada organisasi.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Bengkalis) (Romadaniati, Taufeni Taufik, Azwir Nasir)

DAFTAR RUJUKAN

- Agusyani, K. S., Sujana, E. dan Wahyuni, M. A. (2016) “Pengaruh Whistleblowing System Dan Kompetensi Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng),” 1.
- Atmadja, A. T. dan Saputra, A. K. (2017) “Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 1, hal. 7. doi: 10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02.
- Bernardin, D. E. Y. dan Solihat, I. (2019) “Internal whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi,” Jurnal Sain Manajemen, Vol.1 No.1 Agustus 2019, 1(1), hal. 107–119.
- Desmita (2017) *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Dewi, M. (2016) “Pengaruh Red Flags, Whistleblowing, Dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan,” Skripsi.
- Fitrawansyah (2014) *Fraud & Auditing*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Huda, Nurul; Sadeli, D. H. (2018) “PPengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, X(3), hal. 243–252.
- Hutapea, Parulian; Thoha, N. (2008) *Kompetensi Plus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) “Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing System - WBS).” Tersedia pada: <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>.
- Kurniawan, A. (2014) *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Kurniawan, A. (2018) *Korupsi: Membuka Pandora Box, Perilaku Korup dari Dimensi Etika, Budaya dan Keperilakuan*. Yogyakarta: ANDI dan BPFE.
- Manafe, M. W. N. (2015) “Pengaruh Penalaran Moral, Retaliasi dan Gender Terhadap Kecenderungan Whistleblowing Internal,” Wahana Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 18(2), hal. 113–123.
- Mulyadi (2016) *Sistem Akuntansi*.
- Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 108 Tahun 2017 (2017) *Kompetensi Pemerintahan*, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- PP, Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 (2008) “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” hal. 101.
- Purba, B. P. (2015) *Fraud dan Korupsi, Pencegahan, Pendeteksian dan Pemberantasannya*. Jakarta: Lestari Kiranatama.
- Purwitasari, A. (2017) “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Survey Pada 5 Rumah Sakit Di Bandung),” Skripsi, 2(4), hal. 1–127. doi: 10.1016/S0140-6736(79)91018-3.
- Suradi (2006) *Korupsi Dalam Sektor Publik dan Swasta, Mengurai Pengertian Korupsi, Pendeteksian, Pencegahannya dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Taufik, T. (2011) “Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Pencegahan Kecurangan,” Pekbis Jurnal, 3(2), hal. 512–520.
- Taufik, T. (2019) “The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact On Fraud Prevention,” *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), hal. 2159–2165.
- Usman, Bhima Azis, T. T. dan M. R. (2015) “Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada SKPD Pemerintah Kab. Indragiri Hilir),” 23.
- Wahyuni, E. S. dan Nova, T. (2019) “Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Fraud,” *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), hal. 189. doi: 10.35314/inovbiz.v6i2.867.
- Welton, R. E.; LaGrone, M. . D. (1994) “Promoting The Moral Development of Accounting Graduate Students: An Instructional Design And Assessment,” in.
- Wonar, K., Falah, S. dan Pangayow, B. J. . (2018) “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(November), hal. 63–89. Tersedia pada: <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- YR, R. D. (2017) *Fraud: Penyebab dan Pencegahannya*. Bandung: Alfabeta.